KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mahasiswa wajib memiliki kepesertaan aktif JKN
Tanggal : Minggu, 24 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Mahasiswa Wajib Memiliki Kepesertaan Aktif JKN

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan, pihaknya mengusulkan agar mahasiswa baru di perguruan tinggi wajib menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperluas cakupan perlindungan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan bahkan telah menyurati Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terkait rencana kerja sama tersebut.

"Kami sedang merencanakan dan bersurat ke Kemendikti agar pengajuan kerja sama ini bisa diterima. Nantinya, setiap mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi BPJS-nya harus aktif," kata Prihati Pujowaskito atau Pujo.

Usulan itu kemudian mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago. Menurut Irma, kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan sebenarnya sudah diatur dalam regulasi yang berlaku.

"Kewajiban ini sudah diatur dalam Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan diperkuat melalui Peraturan Presiden, termasuk Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan," kata Irma, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, mayoritas mahasiswa pada dasarnya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui Kartu Keluarga (KK) orang tua mereka. Karena itu, mahasiswa sebenarnya sudah tercakup dalam perlindungan JKN, tanpa harus mendaftar ulang secara mandiri.

Politikus Partai NasDem tersebut kemudian mempertanyakan mekanisme usulan BPJS Kesehatan apabila mahasiswa nantinya diwajibkan menjadi peserta aktif secara mandiri. "Maksudnya mahasiswa tersebut dikeluarkan dari KK orang tuanya lalu daftar pribadi begitu?" katanya.

Irma menilai, yang paling penting adalah memastikan kepesertaan mahasiswa tetap aktif dan dapat digunakan saat dibutuhkan, bukan justru menambah beban administrasi baru bagi mahasiswa maupun orang tua.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, sangat mendukung adanya kebijakan ini. Menurut dia, JKN sangat penting bagi mahasiswa karena pola hidup mereka kerap kurang sehat.

"Mahasiswa juga rentan sakit, seperti maag, tifus, atau penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyarankan kepada BPJS dan kampus untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait aturan ini kepada masyarakat agar publik memahami tujuan dari kebijakan tersebut.

Usulan BPJS Kesehatan mengenai kewajiban kepesertaan aktif JKN bagi mahasiswa baru sebelumnya menuai beragam respons. Sebagian pihak mendukung karena dinilai penting untuk menjamin perlindungan kesehatan mahasiswa, sementara pihak lain meminta implementasinya tidak menyulitkan masyarakat maupun menghambat akses pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Edy Wuryanto dan Timboel Siregar terkait usulan mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi wajib memiliki kepesertaan BPJS aktif.

TIMBOEL SIREGAR, Koordinator Advokasi BPJS Watch

Saya Setuju, Karena Mahasiswa Rentan Sakit



> Banyak mahasiswa tidak tahu aturan itu. Akibatnya, ketika sakit mereka baru bingung karena kepesertaannya tidak aktif. Ini yang harus terus diedukasi, baik oleh BPJS Kesehatan maupun kampus.

Belakangan muncul usulan agar mahasiswa diwajibkan memiliki kepesertaan aktif JKN. Bagaimana pandangan Anda?

Saya sangat setuju jika perguruan tinggi mewajibkan mahasiswa memiliki JKN aktif. Mahasiswa juga rentan sakit, seperti maag, tifus, atau penyakit akibat pola hidup yang tidak sehat. Dengan JKN, mereka punya perlindungan kesehatan dan bisa mendapatkan pelayanan kapan saja dibutuhkan.

Sebagian mahasiswa sebenarnya masih ditanggung orang tua, ya?

Betul. Mahasiswa berusia di bawah 21 tahun otomatis masih dijamin orang tua. Bahkan kalau usianya sudah di atas 21 tahun tetapi masih kuliah dan belum berusia 25 tahun, mereka tetap bisa dijamin. Namun, syaratnya status kuliahnya harus dilaporkan ke BPJS Kesehatan supaya kepesertaannya tidak dinonaktifkan.

Berarti sosialisasi menjadi hal penting?

Sangat penting. Banyak mahasiswa tidak tahu aturan itu. Akibatnya, ketika sakit mereka baru bingung karena kepesertaannya tidak aktif. Ini yang harus terus diedukasi, baik oleh BPJS Kesehatan maupun kampus.

Bagaimana dengan mahasiswa yang kuliah di luar daerah asal?

Mahasiswa bisa pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke kota tempat kuliah. Namun, kalau belum sempat pindah, mereka tetap bisa menggunakan layanan kesehatan maksimal tiga kali dalam sebulan di fasilitas kesehatan lain meskipun FKTP-nya masih di daerah asal.

Bagaimana dengan mahasiswa dari keluarga kurang mampu?

Mereka harus dipastikan terlindungi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang dibiayai APBN maupun APBD. Negara harus hadir memastikan mahasiswa dari keluarga miskin tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

Apa yang perlu dilakukan kampus selain memastikan kepesertaan JKN?

Kampus juga harus aktif memberikan edukasi kesehatan preventif. Mahasiswa sering begadang, makan tidak teratur, stres belajar, bahkan merokok. Itu semua berisiko menimbulkan penyakit seperti maag dan tifus. Jadi, edukasi pola hidup sehat juga penting.

Apa ada usulan khusus dari BPJS Watch untuk kampus?

Saya pernah mengusulkan agar materi tentang JKN dan BPJS Ketenagakerjaan masuk sebagai Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Kalau belum bisa, minimal ada sosialisasi rutin di kelas atau lingkungan kampus mengenai cara penggunaan JKN dan manfaatnya.

Pesan terakhir untuk mahasiswa?

Jangan menunggu sakit dulu baru bingung. Pastikan kepesertaan JKN aktif dan pahami cara menggunakannya. Dengan JKN, mahasiswa bisa lebih tenang menjalani kuliah karena punya perlindungan kesehatan. ■ REN

EDY WURYANTO, Anggota Komisi IX DPR RI

BPJS & Kampus Wajib Lakukan Sosialisasi



> Perguruan tinggi jangan sampai mengganggu atau menghalangi masyarakat mendapatkan akses pendidikan hanya karena persoalan kepesertaan JKN.

Bagaimana pandangan Anda terkait wacana kewajiban kepesertaan aktif JKN bagi mahasiswa?

Secara yuridis, seluruh rakyat Indonesia memang wajib ikut Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi, mahasiswa juga bagian dari warga negara yang harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Mengapa menurut Anda kebijakan ini penting bagi mahasiswa?

Secara sosiologis, sakit itu bisa datang mendadak dan biaya pengobatan mahal. Sementara mahasiswa banyak yang tinggal jauh dari keluarga. Karena itu, jaminan sosial kesehatan menjadi sangat penting agar mahasiswa memiliki perlindungan ketika membutuhkan layanan kesehatan.

Apa yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan dalam implementasi kebijakan ini?

Yang paling penting adalah BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi mengenai kepesertaan dan manfaat JKN. Mahasiswa harus memahami bagaimana mekanisme layanan, hak mereka sebagai peserta, dan cara mengakses fasilitas kesehatan.

Bagaimana dengan mahasiswa yang sudah berusia 25 tahun?

Kalau mahasiswa sudah berusia 25 tahun, maka status kepesertaannya harus dilaporkan dan disesuaikan ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ada kekhawatiran aturan ini bisa menghambat akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Apa tanggapan Anda?

Perguruan tinggi jangan sampai menggangu atau menghalangi masyarakat mendapatkan akses pendidikan hanya karena persoalan kepesertaan JKN. Kalau ada mahasiswa dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar iuran, maka harus diberikan solusi dan mitigasi melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Artinya mahasiswa miskin tetap harus bisa kuliah?

Betul. Pada hakikatnya, tidak boleh ada masyarakat miskin yang terhalangi mendapatkan pendidikan karena aturan ini. Negara harus hadir memberikan perlindungan sekaligus memastikan akses pendidikan tetap terbuka.

Apa peran Kemendikti dalam persoalan ini?

Kementerian Pendidikan Tinggi harus melakukan advokasi dan edukasi kepada seluruh rektor perguruan tinggi agar implementasi kebijakan ini dipahami dengan baik. Jangan sampai tujuan negara memberikan akses kesehatan justru menjadi hambatan baru bagi mahasiswa.

Apa pesan Anda kepada kampus-kampus di Indonesia?

Saya kira semua kampus, baik swasta maupun negeri, harus memahami bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi mahasiswa. Jangan sampai semangat negara untuk memperluas akses kesehatan malah terhambat dalam pelaksanaannya. ■ REN